



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Pemkot Bengkulu Diambang Kebangkrutan Salah Siapa?

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu di ambang kebangkrutan. Bahkan di masa akan datang sulit untuk melakukan pembangunan. Anggaran tersedot untuk belanja pegawai. Makin berat lagi membayar gaji PPPK Paruh Waktu. Berikut Laporan Khusus (Lapsus) minggu ini.

TANTANGAN Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi dan Wakil Walikota Bengkulu Ronny PL Tobing membangun Kota Bengkulu semakin berat. Anggaran pembangunan bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain yang sesungguhnya dapat diprioritaskan membangun infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, tapi kenyataannya harus dibebankan untuk membiayai belanja pegawai sekitar 60 persen.

Belumlah tuntas memikirkan cara agar bisa membangun Kota Bengkulu di tengah kebijakan Pemerintah Pusat mengatur efisiensi anggaran.

Persoalan terbaru malah muncul setelah Kementerian PAN-RB menerbitkan aturan baru yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Adapun isi keputusan tersebut terkait penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Dengan begitu beban belanja pegawai Pemkot Bengkulu semakin membengkak. APBD hampir habis untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN. Belum lagi biaya rutin lainnya.

Berdasarkan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, APBD Kota Bengkulu tahun 2025 sebesar Rp1,33 Triliun. Sementara 59,83 persen diperuntukkan Belanja pegawai dengan total Rp789.184.762.165 bila ditambah dengan PPPK Paruh Waktu di penghujung tahun ini. Tahun depan dipastikan belanja pegawai bakal membengkak dengan adanya Keputusan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025 untuk membiayai PPPK Paruh Waktu selama satu tahun berjalan.

Adapun rincian belanja pegawai untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS 3910 orang, PPPK Formasi 2021 - 2025 2745 orang, PPPK Tahap II: 723 orang, Pegawai R2,R3,R4 (PPPK Paruh Waktu) 430 orang. Adapun total keseluruhan ASN 7808 orang.

Anggaran belanja pegawai yang dikeluarkan terdiri dari belanja gaji ASN dan tunjangan Rp505.035.754.925, belanja tunjangan PNS (TPP) dan guru (TPG) Rp202.840.023.134, belanja pegawai lainnya (BLUD dan BOS) Rp50.000.000.000, Beban Belanja Pegawai paruh waktu Rp7.817.400.000. Total Rp765.693.178.059.

Namun dari total belanja pegawai yang 59,83 persen belum termasuk beban belanja untuk PPPK Paruh Waktu untuk satu berjalan. Sementara Pemerintah Pusat tidak menyertai pembiayaan atau bantuan anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu.

Sementara APBD yang 40 persennya lagi diperuntukkan untuk belanja rutin 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu dan beban belanja pegawai untuk PPPK Paruh Waktu dipastikan dibebankan dari APBD. Sehingga menimbulkan pertanyaan berapa lagi anggaran untuk pembangunan di kota Bengkulu.

Anggota DPRD Kota Bengkulu Dedyanto, mengatakan, Walikota sudah mengambil langkah mengakomodir keinginan PPPK Paruh waktu diusulkan ke Kementerian untuk diangkat.

"Konsekuensi dari semua itu adalah belanja pegawai kita saat ini sudah di angka 54 persen, maka dengan pengangkatan PPPK Paruh Waktu tersebut akan naik menjadi 59,83 persen. Artinya sudah hampir 60 persen belanja pegawai," sampai Dedyanto.

Ditambahkannya, maka dana untuk modal pembangunan itu hanya tinggal 40 persen, nah 40 persen inilah yang akan kita pakai dan berdayakan untuk membangun kota Bengkulu di semua sektor.

"Nah tinggal kita hitung, dana kita di APBD itu berapa, Rp1,33 Triliun. Artinya dana tersebut sangat kurang dan menyebabkan Kota Bengkulu berpotensi bangkrut," tambahnya.

Dijelaskannya, solusinya adalah melakukan rasionalisasi terhadap anggaran untuk perjalanan dinas bagi semua pihak. Selain itu, mengkaji ulang soal belanja pegawai di setiap OPD kemudian meningkatkan PAD, dan harus berani melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan PAD.

"Kita mendorong agar setiap OPD, salah satu instrumen yang disebut berhasil itu adalah mampu mendatangkan uang dari kementerian atau program, tidak dalam bentuk uang tapi program pembangunan yang masuk ke kota Bengkulu," jelasnya.

Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi membenarkan kebijakan tersebut dan pembengkakan anggaran belanja pegawai di Pemkot Bengkulu.

"Akan ada rencana itu untuk efisiensi, karena memang kondisi anggaran belanja pegawai kita sangat besar. Memang dilematis, sisi lain saya selaku Walikota ingin memberi ruang lapangan pekerjaan kepada teman-teman yang sudah lama honor. Oleh karena itu saya mohon pengertian pada semua pihak karena berdampak pada semua program pembangunan," Kata Dedy.

Ketika ditanya apakah usulan kenaikan TPP Pemkot akan dievaluasi lagi, Dedy mengatakan, pada awalnya kita mau naikkan namun dengan adanya kebijakan kita evaluasi lagi.

"Saya sudah ada rencana, sudah bentuk tim untuk menaikkan TPP Camat, kepala Puskesmas, lurah, tapi dengan kondisi begini ya akan kita pertimbangkan lagi, jangan sampai di beberapa daerah cuma angkanya saja yang ada gak ada uangnya." Pungkasnya. (her)